

**ANALISIS EFISIENSI BELANJA DAERAH  
DI JAWA TIMUR  
(Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun  
2009-2011)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Triyanti Lestari  
0910210092**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2013**

## **LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

### **ANALISIS EFISIENSI BELANJA DAERAH DI JAWA TIMUR (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2009-2011)**

Yang disusun oleh :

Nama : Triyanti Lestari  
NIM : 0910210092  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Juli 2013

Malang, 22 Juli 2013  
Dosen Pembimbing,

**Dr. Moh. Khusaini., SE., M.Si., MA  
NIP. 19710111 199802 1 001**

## ANALISIS EFISIENSI BELANJA DAERAH DI JAWA TIMUR ( STUDI KASUS BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TAHUN 2009-2011)

Triyanti Lestari, Moh. Khusaini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email : [lestari\\_triyanti@yahoo.com](mailto:lestari_triyanti@yahoo.com)

### ABSTRACT

Fiscal decentralization in Indonesia is more focused on the expenditure side. Region are given considerable authority to spend the funds. And in almost all regions in Indonesia, including East Java has increased spending every year. With the increase in the expenditure should be followed by an increase in output, but not necessarily as it happens. Spending efficiency is an important issue in the public sector policy, expenditure which efficient is believed can encourage an increase in the welfare. The purpose of this study is to analyze the efficiency of public spending in East Java, especially education and health spending. This study uses the data on period 2009-2011, covering 10 districts / cities in East Java and uses Data Envelopment Analysis. Input variables used are education spending and health spending. Output variables for education using the number of schools, number of teachers and number of students, and for health use a number of puskesmas (health centers), the number of health workers in puskesmas (health centers) and number of immunization.

Based on calculations by the DEA found that the efficiency score varies in each region and in general there are many region which their spending have not been efficient. Education spending is still better than health spending. And Malang is the most efficient and Surabaya is the most inefficient among the ten regions studied. Some improvement in each variable is still required for areas that have not been efficient.

**Kata Kunci :** Efisiensi, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, *Data Envelopment Analysis*

### A. LATAR BELAKANG

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah menunjukkan secara tegas kesepakatan politis yang menetapkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menitikberatkan desentralisasi pada sisi belanja. Kewenangan yang didelegasikan kepada daerah untuk mendapatkan penerimaan masih relatif terbatas. Sementara di sisi lain, daerah diberikan kewenangan yang cukup besar untuk membelanjakan dana yang dikelolanya.

Dengan diskresi belanja daerah yang luas tersebut, maka kualitas belanja daerah akan sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh daerah itu sendiri. Dengan input dana publik yang selalu bersifat terbatas, maka daerah dituntut untuk mempunyai strategi yang jitu dalam mengelola dan mengalokasikannya secara efisien, sehingga mampu memberikan output layanan publik yang optimal. Selanjutnya diharapkan pilihan atas prioritas output tersebut akan menghasilkan *outcome* yang signifikan, yang berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik dan mendorong aktivitas sektor swasta di daerah yang bersangkutan. Belanja yang tidak optimal dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik dan menurunnya aktivitas sektor swasta. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang publik dan regulasi lokal, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan produktivitas ekonomi di daerah semakin meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut maka peran optimalisasi belanja daerah akan mempengaruhi pembangunan ekonomi di daerah.

Oleh karena itu, belanja pemerintah yang efisien merupakan isu penting dalam kebijakan sektor publik, belanja yang efisien diyakini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Isu efisiensi belanja pemerintah ini menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi makroekonomi. Belanja pemerintah yang efisien sangat erat kaitannya dengan proses penganggaran baik proses penyusunan anggaran pemerintah pusat maupun penyusunan anggaran pemerintah daerah.

Besarnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik melalui pengeluaran belanja tampak dari alokasi pengeluaran belanja pemerintah daerah. Sejak tahun 2009, Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana yang cukup besar untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya peningkatan belanja tersebut seharusnya diikuti peningkatan output, namun belum tentu seperti itu yang terjadi. Suatu belanja dikatakan efisien apabila telah di alokasikan secara tepat dan menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Efisiensi menurut Kurnia (2006) adalah suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi belanja pemerintah juga bisa didefinisikan sebagai input yang tersedia mampu menghasilkan output berupa barang atau jasa pada tingkat yang paling optimal bagi kepentingan masyarakat luas.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat juga diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan (Prasetya, 2012). Pengeluaran publik merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah yang dialokasikan dalam sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007, urusan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Teori makro mengenai pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yakni Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, Teori Adolf Wagner dan Teori Peacock dan Wiseman. Sedangkan untuk teori secara mikro yang mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja.

### **Belanja Daerah**

Dalam Permendagri No.59 Tahun 2007, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No.59 Tahun 2007 terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Belanja menurut kelompok belanja dalam Permendagri No.59 Tahun 2007 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Jenis belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan seperti belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

### **Efisiensi : Makna dan Konsep**

Menurut Mardiasmo (2009) Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara output /input yang dikaitkan dengan standar

kinerja atau target yang telah ditetapkan. pengertian efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Lebih lanjut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Unit A lebih efisien dibanding unit B, unit A lebih efisien tahun ini bila dibandingkan dengan tahun lalu, dan seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input
3. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama
4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

Menurut Ozcan (2008) dalam Wulansari (2010), dasar efisiensi adalah rasio/perbandingan output terhadap input. Cara untuk meningkatkan efisiensi antara lain dengan:

- a. Meningkatkan output,
- b. Mengurangi input,
- c. Atau jika keduanya ditingkatkan, maka tingkat kenaikan untuk output harus lebih besar daripada tingkat kenaikan untuk input atau,
- d. Jika kedua output dan input diturunkan, laju penurunan untuk output harus lebih rendah daripada tingkat penurunan untuk input.

Cara lain yang bisa digunakan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi selain keempat cara diatas adalah dengan menerapkan teknologi manajemen yang dapat mengurangi input maupun meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan lebih banyak output. Beberapa konsep mengenai efisiensi antara lain yang dikemukakan oleh Ramesh Bhat (2001) dalam Wulansari (2010):

- a. Efisiensi teknis

Efisiensi ini berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja, modal, dan mesin sebagai input untuk menghasilkan output maksimum. Dengan menerapkan teknologi yang sama pada semua unit maka diharapkan tidak akan ada input yang sia-sia dalam memproduksi kuantitas output tertentu. Sebuah organisasi yang beroperasi lebih baik daripada semua organisasi lain yang disampel, maka bisa dikatakan bahwa organisasi ini telah efisien secara teknis.

- b. Efisiensi alokatif

Berkaitan dengan meminimalkan biaya produksi dengan pilihan input yang tepat untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu dengan mempertimbangkan tingkat harga input, dengan asumsi bahwa organisasi yang diuji sudah sepenuhnya efisien secara teknis. Efisiensi alokatif dinyatakan sebagai skor persentase, dimana skor 100 persen menunjukkan bahwa organisasi telah menggunakan inputnya dalam proporsi yang akan meminimalkan biaya. Sebuah organisasi yang beroperasi pada praktek terbaik secara teknis masih bisa secara alokatif dikatakan tidak efisien karena tidak menggunakan input dalam proporsi yang meminimalkan biaya, pada harga input relatif tertentu.

- c. Efisiensi biaya/ keseluruhan

Berkaitan dengan kombinasi efisiensi teknis dan alokatif. Sebuah organisasi dikatakan melakukan efisien biaya jika dia bisa efisien baik secara alokatif maupun secara teknis. Efisiensi biaya dihitung sebagai produk dari nilai efisiensi teknis dan efisiensi alokatif (ditunjukkan dalam persentase), sehingga organisasi hanya dapat mencapai 100 persen nilai efisiensi biaya jika telah mencapai 100 persen efisiensi baik teknis dan alokatif

### **Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik**

Mardiasmo (2009) juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu

pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumberdaya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi pengeluaran belanja pemerintah daerah diartikan ketika setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan optimal. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien (Kurnia, 2006)

Dalam kaitannya dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah, ada tiga jenis efisiensi yang penting untuk dilihat yaitu (Kurnia, 2006):

1. Efisiensi produksi.

Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, efisiensi produksi bisa dicapai karena sumber daya yang ada dialokasikan di antara berbagai pengeluaran yang menghasilkan output yang paling maksimal. Pengukuran dan perbandingan relatif efisiensi produksi ini bisa dilakukan secara langsung dengan kategori-kategori tertentu yang akan dilihat misalnya, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan lain-lain

2. Efisiensi alokasi.

Efisiensi alokasi adalah efisiensi yang menyangkut kesesuaian pengeluaran belanja dengan preferensi masyarakat. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, efisiensi alokasi bisa karena sumber daya yang ada dialokasikan di antara berbagai jenis pengeluaran belanja yang sesuai dengan preferensi masyarakat daerah. pengukuran efisiensi alokasi ini tidak bisa dilakukan secara langsung karena ukuran preferensi marginal masyarakat sulit untuk diketahui.

3. Efisiensi fiskal.

Efisiensi fiskal adalah efisiensi yang menyangkut sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran belanja pemerintah daerah. secara umum sumber penerimaan pemerintah daerah berasal dari dua komponen utama, yaitu: PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dana perimbangan (transfer dari pemerintah pusat). Efisiensi fiskal dalam kaitannya dengan sumber penerimaan daerah ini menyangkut tiga hal: (1) apakah pajak dan retribusi daerah yang dipungut merupakan pajak yang tepat dalam artian bahwa pajak dan retribusi daerah yang dipungut dari objek pajak tertentu langsung terkait dengan target-target pengeluaran tertentu pula? (2) dana perimbangan seharusnya ditujukan untuk penyesuaian-penyesuaian karena adanya eksternalitas tanpa mengganggu kepentingan pemerintah daerah, (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak menyebabkan tekanan dan dampak negatif terhadap stabilitas makroekonomi regional.

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini berfokus pada efisiensi belanja bidang pendidikan dan kesehatan. Unit ekonomi atau DMU dari penelitian ini adalah 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Jombang.

Variabel input yang digunakan adalah belanja pendidikan dan belanja kesehatan. Variabel output untuk pendidikan menggunakan jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah siswa, dan untuk kesehatan menggunakan jumlah puskesmas, jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dan jumlah imunisasi. Data input diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu berupa laporan APBD klasifikasi fungsi. Data output diperoleh dari Jawa Timur Dalam Angka dan Profil Kesehatan Jawa Timur.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non parametrik yaitu dengan menggunakan analisis DEA (*Data Envelopment Analysis*). Alasan utama yang mendasari kenapa penelitian ini menggunakan DEA adalah karena DEA dapat mengakomodasi banyak input dan output dalam perhitungan model program liniernya guna menghasilkan nilai tunggal efisiensi bagi setiap observasi. DEA juga dapat memberikan nilai perbaikan bagi setiap variabel yang diobservasi pada setiap DMU nya untuk mencapai efisiensi. Selain itu DEA juga mempunyai keunggulan dan kelemahan tersendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam DEA, efisiensi relatif DMU didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbangnya (*total weighted output/total weighted input*). Inti dari DEA adalah menentukan bobot untuk setiap input dan output DMU. Bobot tersebut memiliki sifat : (1) tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal, artinya setiap DMU dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (*total weighted output/total weighted input*) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (*total weighted output/total weighted input <1*). (Pertiwi, 2007)

Menurut Pertiwi (2007), DEA berasumsi bahwa setiap DMU akan memilih bobot yang memaksimalkan rasio efisiensinya (*maximize total weighted output/total weighted input*). Secara umum DMU akan mendapatkan bobot yang tinggi untuk input yang penggunaannya sedikit dan untuk output yang dapat diproduksi dengan banyak. Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari input dan outputnya, melainkan sebagai variabel keputusan penentu untuk memaksimalkan efisiensi dari suatu DMU.

Model matematis DEA yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model dasar yang dibangun oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (1978) yang mengasumsikan fungsi produksi dengan tingkat pengembalian yang tetap (*Constant Return to Scale*). Secara teknis, ada dua tahap yang harus dilalui dalam model matematis yang dikenal dengan DEA-CCR ini, yaitu tahap pertama model DEA diformulasikan dari persamaan fraksional atau yang dikenal dengan istilah *Fractional Programming* (FP) yang menggunakan unit input dan output sebagai variabel keputusan. Kemudian pada tahap berikutnya, persamaan fraksional (FP) akan diubah ke persamaan linier (LP) ekuivalen melalui metode simpleks untuk menemukan solusi optimal untuk fungsi tujuan.

Secara teknis, unit ekonomi model DEA diformulasikan dari persamaan fraksional yang menggunakan unit input dan output sebagai variabel keputusan. Misalkan ada  $n$  unit akan dibandingkan. Setiap unit menggunakan  $m$  input dan menghasilkan  $s$  output, di mana  $Y_{sj} > 0$  dan  $X_{mj} > 0$ .  $Y_{sj}$  adalah output  $s$  yang diproduksi oleh  $j$  unit, sementara  $X_{mj}$  mewakili input  $m$  yang digunakan oleh unit  $j$ .  $v_i$  adalah bobot input ( $i = 1, 2, \dots, m$ ) dan  $u_r$  adalah bobot output ( $r = 1, 2, \dots, s$ ). Setiap unit ekonomi akan memiliki satu formulasi persamaan fraksional. Fungsi tujuan dari persamaan fraksional untuk unit  $o$  dapat digambarkan sebagai berikut (Cooper et al, 2000 dalam Saputra, 2011):

$$(FP_o) \max \theta = \frac{u_1 y_{1o} + u_2 y_{2o} + \dots + u_s y_{so}}{v x_o} \quad (1)$$

kendala

$$\frac{u_1 y_{1j} + \dots + u_s y_{sj}}{v x_j} \leq 1 (j = 1, 2, \dots, n) \quad (2)$$

$$v_1 \geq 0 \quad (3)$$

$$u_1, u_2, \dots, u_m \geq 0 \quad (4)$$

Kemudian pada tahap selanjutnya, persamaan fraksional akan diubah menjadi persamaan linier (LP<sub>o</sub>) melalui metode simpleks untuk menemukan solusi optimal untuk fungsi tujuan. Secara umum, Cooper et al. (2000) persamaan linier (LP<sub>o</sub>) ditentukan sebagai berikut : Saputra (2011)

$$(LP_o) \max \theta = u_1 y_{1o} + \dots + u_s y_{so} \quad (5)$$

Kendala

$$v x_o = 1 \quad (6)$$

$$u_1 y_{1j} + \dots + u_s y_{sj} \leq v x_j \quad (7)$$

$$(j = 1, 2, \dots, n) \quad (8)$$

$$v \geq 0 \quad (8)$$

$$u_1, u_2, \dots, u_m \geq 0 \quad (9)$$

Dalam rangka untuk menjawab tujuan penelitian, model DEA dari no 5 sampai 9 akan digunakan untuk mengkalkulasi efisiensi relatif dari belanja daerah di Jawa Timur, dimana Unit  $o$  = Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diamati, Unit  $j$  = kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur yang diperbandingkan,  $n$  = jumlah kabupaten/kota yang dinilai dalam analisis yakni 10 kab/kota,  $m$  = jumlah input yang digunakan, ada 1 yaitu anggaran pendidikan/kesehatan,  $s$  = jumlah output yang dihasilkan oleh kabupaten/kota, di bidang pendidikan ada 3 output, di bidang kesehatan ada 3 output,  $Y$  = variabel output,  $X$  = variabel input,  $Y_{so}$  = Output ke  $s$  yang dihasilkan oleh unit  $o$ ,  $Y_{sj}$  = output ke  $s$  yang diproduksi oleh unit  $j$ ,  $X_{1o}$  = Input 1 yang digunakan oleh unit  $o$ ,  $X_{1j}$  = input 1 yang digunakan oleh unit  $j$ ,  $v$  = bobot input,  $u_r$  = bobot output ke  $l$  s.d  $s$  ( $r = 1, 2, 3, \dots, s$ ) = nilai

yang dioptimalkan yang menunjukkan tingkat efisiensi. Model ini mengacu pada Charnes, Chooper dan Rhodes (CCR) Model yang menggunakan asumsi CRTS. Mengikuti ide Farrell dalam orientasi ukuran, penelitian ini akan menggunakan orientasi output dimana fokusnya adalah konsisten hanya pada gerakan maksimal proporsional dari unit ekonomi dalam menambah output dengan himpunan input. (Coelli, 1996) dalam Saputra (2011).

Untuk mengevaluasi efisiensi pengeluaran pemerintah sektor publik, teknik DEA yang digunakan dalam penelitian ini adalah *input-oriented* dengan skala pengembalian yang tetap (*constant return to scale*). Dengan DEA *input-oriented*, model pemrograman linier dikonfigurasi untuk menentukan berapa banyak input yang dapat dikurangi pada tingkat output yang sama.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Perhitungan Efisiensi Menggunakan Metode DEA

Nilai efisiensi dari belanja pendidikan dan kesehatan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang berorientasi input (*input oriented*) dengan bantuan *Software Banxia Frontier Analyst 4*. DEA akan menghasilkan nilai efisiensi antar unit kegiatan ekonomi yang dalam hal ini terdiri atas sepuluh Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada Tahun 2009-2011. Efisiensi metode DEA adalah efisiensi relatif. Kab/kota yang memiliki nilai efisiensi terbaik yakni 100% dijadikan sebagai acuan bagi Kab/Kota lainnya. Berikut merupakan nilai efisiensi belanja pendidikan pada sepuluh Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011.

Tabel 1: Nilai Efisiensi belanja Pendidikan 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011

No	Daerah	2009	2010	2011
1	Kota Surabaya	89.60%	79.70%	63.30%
2	Kab. Jember	100%	99.20%	100%
3	Kab. Sidoarjo	100%	93.30%	100%
4	Kab. Malang	89.90 %	100%	99.10%
5	Kab. Kediri	81.90%	66.70%	81.20%
6	Kab. Pasuruan	100%	95%	81.10%
7	Kab. Blitar	73.40%	69.30%	59.20%
8	Kab. Nganjuk	64.60%	58.10%	100%
9	Kab. Bojonegoro	100%	100%	71.30%
10	Kab. Jombang	91,7%	96.90%	93%

Sumber : hasil olahan

Berdasarkan tabel 1 diatas terdapat empat Kabupaten yang mempunyai tingkat efisiensi tertinggi pada 2009 yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Bojonegoro dengan nilai 100 %. Selanjutnya keempat Kabupaten tersebut akan menjadi pembanding bagi daerah lain yang belum efisien. Tahun 2010 hanya ada dua daerah yang mempunyai tingkat efisiensi 100% yaitu Kab.Malang dan Kab. Bojonegoro. Tahun 2011, ada tiga daerah yang mempunyai tingkat efisiensi 100% yaitu Kab. Jember, Kab. Sidoarjo dan Kab. Nganjuk.

Selanjutnya nilai efisiensi belanja kesehatan di sepuluh Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011 ditunjukkan oleh tabel 2. Kab. Malang merupakan satu-satunya daerah yang belanja kesehatannya selalu efisien. Artinya Kab. Malang telah membelanjakan belanja kesehatannya secara tepat dan akan menjadi acuan bagi sembilan Kab./Kota lainnya yang masih belum efisien. sedangkan daerah lain yang mencapai efisien adalah Kab. Blitar yaitu pada tahun 2011.

Sementara itu Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan setiap tahunnya padahal anggaran belanja kesehatan Kota Surabaya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Seharusnya dengan belanja yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya Kota Surabaya bisa meningkatkan efisiensinya. Daerah lain yang mengalami penurunan seperti Surabaya adalah Kab. Jember dan Kab. Kediri. Secara keseluruhan antara pendidikan dan kesehatan dapat diketahui bahwa belanja pendidikan lebih efisien jika dibandingkan belanja kesehatan.

Tabel 2 : Nilai Efisiensi Belanja Kesehatan 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011

No	Daerah	2009	2010	2011
1	Kota Surabaya	75.20%	58.20%	27.30%
2	Kab. Jember	89.90%	88.60%	82.10%
3	Kab. Sidoarjo	39.40%	43.20%	45.20%
4	Kab. Malang	100%	100%	100%
5	Kab. Kediri	97.80%	95.70%	75.40%
6	Kab. Pasuruan	78%	70.20%	82.50%
7	Kab. Blitar	67.50%	90.40%	100%
8	Kab. Nganjuk	55%	59.80%	62.20%
9	Kab. Bojonegoro	66.90%	71.80%	81.90%
10	Kab. Jombang	88.90%	70.80%	77.80%

Sumber: Hasil Olahan, 2013

### Meminimumkan Input untuk Meningkatkan Efisiensi

Setelah sebelumnya diketahui nilai efisiensi, kali ini dibahas mengenai cara meningkatkan efisiensi. DEA selain dapat menghasilkan nilai efisiensi juga dapat menghasilkan potential improvement atau tingkat perbaikan yang diperlukan. Efisiensi metode DEA adalah efisiensi relatif. Untuk meningkatkan tingkat efisiensi yang ditunjukkan dengan angka 100% maka dapat diketahui input mana saja yang belum efisien penggunaannya dan output mana saja yang harus ditingkatkan. Yang dimaksud dengan efisien adalah menghasilkan suatu nilai output yang maksimum dengan sejumlah input tertentu, atau dengan input minimum dapat menghasilkan output tertentu.

Agar tingkat efisiensi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur meningkat maka penggunaan input pada Kabupaten/Kota tersebut harus mengacu pada Kabupaten/Kota yang telah efisien. Berikut merupakan tingkat perbaikan (*potential improvement*) pada variabel input.

Tabel 3: *Potential Improvement* Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan pada 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011 (%)

Kab/Kota	2009		2010		2011	
	Belanja Pendidikan	Belanja Kesehatan	Belanja Pendidikan	Belanja Kesehatan	Belanja Pendidikan	Belanja Kesehatan
Kota Surabaya	-10	-24	-20	-41	-36	-72
Kab. Jember	0	-10	0	-11	0	-17
Kab. Sidoarjo	0	-60	-6	-56	0	-54
Kab. Malang	-10	0	0	0	0	0
Kab. Kediri	-18	-2	-33	-4	-18	-24
Kab. Pasuruan	0	-22	-5	-29	-18	-17
Kab. Blitar	-26	-32	-30	-9	-40	0
Kab. Nganjuk	-35	-44	-41	-40	0	-37
Kab. Bojonegoro	0	-33	0	-28	-28	-18
Kab. Jombang	-8	-11	-3	-29	-7	-22

Sumber : Hasil Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat pada tahun 2009 Kota Surabaya pada tingkat output yang sama perlu mengurangi 10 persen belanja pendidikan dan 24 persen belanja kesehatannya agar menjadi efisien. Demikian juga untuk daerah lainnya seperti yang tertera pada tabel diatas. Untuk daerah yang nilai potential improvementnya bernilai nol berarti tidak perlu melakukan perbaikan pada sisi input.

## Memaksimalkan Output untuk Meningkatkan Efisiensi

Untuk mengatasi inefisiensi tidak hanya dapat dilakukan dengan meminimumkan input tetapi dapat juga dilakukan dengan memaksimalkan outputnya. Dalam pembahasan ini agar suatu DMU menjadi efisien maka dapat diselesaikan dengan meningkatkan output dengan input tertentu. Tingkat efisiensi dengan meminimumkan input dan memaksimalkan output mempunyai nilai efisiensi yang sama. Yang membedakan hanyalah pada perubahan yang harus dilakukan baik pada input ataupun pada output. Dalam pembahasan ini, untuk mencapai efisiensi yang sempurna maka output DMU yang belum efisien harus ditingkatkan. Berikut merupakan tingkat perbaikan (*potential improvement*) pada variabel output pendidikan.

Tabel 4: *Potential Improvement* variabel output Pendidikan pada 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011 (%)

Kab/Kota	2009			2010			2011		
	Sekolah	Guru	Siswa	Sekolah	Guru	Siswa	Sekolah	Guru	Siswa
Kota Surabaya	36	0	20	47	0	15	6	0	0
Kab. Jember	0	0	0	14	1	0	0	0	0
Kab. Sidoarjo	0	0	0	56	15	0	0	0	0
Kab. Malang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Kediri	3	0	13	0	2	0	0	0	0
Kab. Pasuruan	0	0	0	9	0	5	0	0	0
Kab. Blitar	0	18	14	0	0	10	0	0	0
Kab. Nganjuk	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Kab. Bnggoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Jombang	18	0	17	40	0	20	0	0	0

Sumber : Hasil Olahan, 2013

Berdasarkan tabel diatas, pada 2010 Kab. Jember agar menjadi efisien perlu menambah jumlah sekolah dan guru masing-masing 14 persen dan 1 persen pada tingkat output yang sama. Demikian juga untuk daerah lainnya seperti yang tertera pada tabel diatas. Pada tabel diatas juga terlihat bahwa pada 2011 hampir semua daerah tidak memerlukan perbaikan pada variabel output. pada 2011 semua daerah tidak perlu menambah jumlah sekolah dan guru lagi kecuali Kota Surabaya yang perlu menambah 6 persen jumlah sekolah pada tingkat input yang sama.

Selanjutnya adalah *potential improvement* pada bidang kesehatan. Berbeda dengan pendidikan, kali ini lebih banyak perbaikan yang diperlukan agar menjadi efisien pada hampir semua daerah kecuali Kabupaten Malang. Kabupaten Malang menjadi satu-satunya pembanding pada bidang kesehatan karena hanya Kabupaten Malang yang efisien. Penjelasan lebih detail untuk Kab/Kota yang lainnya tentang berapa persen jumlah sekolah, guru dan siswa yang perlu ditambah terlihat pada table 5 berikut ini.

Tabel 5: *Potential Improvement* Variabel Output Kesehatan pada 10 Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2011 (%)

Kab/Kota	2009			2010			2011		
	Puskesmas	Nakes	Imunisasi	Puskesmas	Nakes	Imunisasi	Puskesmas	Nakes	Imunisasi
Kota Srby	91	0	90	61	0	82	0	0	31
Kab. Jember	0	60	30	0	41	55	52	0	28
Kab. Sdoarjo	36	0	8	40	0	16	20	1	0
Kab. Malang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Kediri	0	22	24	0	36	31	13	0	4
Kab. Psruan	0	28	277	0	59	53	23	0	22
Kab. Blitar	0	31	41	0	37	46	0	0	0
Kab. Ngnjuk	0	28	40	0	39	53	0	0	33
Kab. Bnggro	0	16	55	0	18	65	0	0	37
Kab. Jmbang	43	0	101	15	0	72	0	4	51

Sumber : Hasil Olahan, 2013

## Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penghitungan nilai efisiensi yang diperoleh melalui metode DEA, diketahui bahwa dari sepuluh Kabupaten/Kota yang diamati selama tiga tahun masih banyak yang

belum mencapai efisiensi 100%. Nilai efisiensi pada masing-masing daerah berbeda satu sama lain. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Verhoeven (2007) dan Gunarson (2008) juga menunjukkan bahwa pada daerah yang diteliti belanja yang digunakan juga masih belum efisien artinya belanja pemerintah dinilai belum dialokasikan dengan benar.

Dua penelitian sebelumnya yang juga meneliti tentang efisiensi di Jawa Timur yaitu Rachmawati (2011) dan Merlinda (2011) hasilnya juga menunjukkan bahwa efisiensi yang dihasilkan dari beberapa Kabupaten/kota yang diteliti juga bervariasi dan secara umum juga masih banyak daerah yang belum efisien.

Secara umum nilai efisiensi belanja pendidikan di hampir semua Kabupaten/Kota yang diteliti selama tiga tahun pengamatan nilai efisiensi belanja pendidikan masih lebih baik jika dibandingkan belanja kesehatannya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pertiwi (2007) yang meneliti efisiensi belanja pendidikan dan kesehatan di Jawa Tengah, pada penelitian tersebut belanja kesehatan lebih baik jika dibandingkan dengan belanja pendidikan. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan hasil bahwa belanja pendidikan lebih baik dari belanja kesehatan. Penelitian Pertiwi (2007) secara umum hasilnya sama seperti penelitian ini yakni secara keseluruhan Kabupaten/Kota yang diteliti masih termasuk belum efisien.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa suatu belanja dikatakan efisien apabila input yang tersedia mampu menghasilkan output berupa barang atau jasa pada tingkat yang paling optimal bagi kepentingan masyarakat, pada kenyataannya ada daerah yang mempunyai input yang besar tetapi output yang dihasilkan tidak sebesar input yang digunakan salah satunya adalah Kota Surabaya.

Jika dilihat dari sisi input Kota Surabaya merupakan daerah dengan input tertinggi akan tetapi output yang dihasilkan tidak sebanding dengan inputnya sehingga nilai efisiensinya tidak pernah mencapai 100% bahkan cenderung rendah yakni rata-rata dibawah 50% baik pada belanja pendidikan maupun kesehatan, sehingga menjadikan Kota Surabaya termasuk daerah yang belanjanya tidak efisien jika dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Nilai efisiensi Kota Surabaya terus menurun dari tahun ke tahun baik pendidikan maupun kesehatan.

Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Merlinda (2011) dimana daerah yang mempunyai input tertinggi seperti Kota Surabaya tidak menghasilkan output yang maksimal sehingga nilai efisiensinya kurang baik. Untuk Kota Surabaya salah satu penyebabnya adalah besarnya anggaran pendidikan Kota Surabaya ternyata tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang seperti yang tertera pada Surabaya pagi.com. disitu juga dijelaskan bahwa selain karena terlalu sedikitnya gedung Sekolah Dasar Negeri(SDN) yang direncanakan dalam program pembangunan infrastruktur bangunan sekolah dasar negeri (SDN), ternyata juga tidak tepat sasaran. Dari penelusuran Surabaya Pagi, ada SDN yang sudah dibangun pada 2010 dan sekolahnya sudah bagus, tapi pada RAPBD 2011 dianggarkan lagi.. Jadi hal-hal seperti itulah yang bias menyebabkan belanja di Kota Surabaya tidak efisien.

Di sisi lain ada daerah yang efisien dalam mengalokasikan belanjanya seperti Kabupaten Malang. Kabupaten Malang termasuk daerah yang efisien dalam membelanjakan belanja pendidikan maupun kesehatan. Dibidang kesehatan, Kabupaten Malang merupakan satu-satunya daerah yang selalu efisien selama kurun waktu pengamatan. Sedangkan di bidang pendidikan walaupun tidak semuanya efisien akan tetapi nilai efisiensi yang diperoleh cukup tinggi.

Yang menjadikan Kabupaten Malang belanja kesehatannya selalu efisien salah satunya adalah karena Pemkab Malang terus meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan seperti yang ada pada bisnis-jatim.com bahwa Pemkab Malang terus meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan berupa pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Lawang, Ruang Rawat Inap Puskesmas Poncokusumo, Puskesmas Donomulyo Kecamatan Donomulyo, Ruang Operasi RSUD Lawang, serta pengembangan Ruang Perawatan TB Paru RSUD Lawang.

Sementara itu Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Jombang merupakan daerah yang kurang mengalokasikan belanja pendidikannya dengan tepat. Kedua kabupaten tersebut belanja pendidikannya selalu meningkat tiap tahunnya akan tetapi nilai efisiensinya justru menurun. Pada kedua kabupaten tersebut jumlah sekolahnya juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana peningkatan belanjanya. Beberapa Kabupaten/Kota belanjanya tinggi akan tetapi nilai efisiensinya masih saja rendah, salah satu penyebabnya bias dikarenakan karena perencanaan yang kurang matang seperti yang terjadi pada Kota Surabaya.

Alasan mengapa beberapa kabupaten tidak efisien adalah karena porsi belanja langsungnya lebih sedikit dibandingkan dengan belanja tidak langsungnya. Misalnya Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jombang yang porsi belanja langsung pendidikannya masing-masing

hanya sebesar 14,8 % dan 11,9% seperti yang dilansir oleh seknas FITRA. Hal inilah yang menyebabkan belanja tidak efisien, artinya belanja lebih banyak digunakan untuk belanja tidak langsung. Dan belanja tidak langsung sebagian besar digunakan untuk belanja gaji pegawai yaitu guru.

Di bidang kesehatan selain Kota Surabaya ada dua kabupaten yang belanjanya selalu meningkat setiap tahunnya tetapi nilai efisiensinya justru selalu menurun yaitu kabupaten Jember dan kabupaten Kediri. Kedua kabupaten tersebut jumlah puskesmasnya tidak mengalami peningkatan dan yang mengalami peningkatan adalah jumlah tenaga kesehatan di puskesmas. Jika dilihat dari hal tersebut ketidakefisienan belanja kesehatan pada kedua kabupaten tersebut salah satunya disebabkan karena belanja kesehatan lebih banyak digunakan untuk keperluan membayar gaji para tenaga kesehatan di puskesmas. Sementara itu Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Nganjuk juga belum dikatakan mengalokasikan belanja kesehatannya dengan tepat walaupun peningkatan belanjanya diikuti dengan nilai efisiensinya.

Di bidang kesehatan, lebih banyak variabel yang memerlukan perbaikan. Hampir semua variabel memerlukan perbaikan baik pada variabel input maupun output. Sementara di bidang pendidikan, perbaikan yang paling tidak diperlukan pada hampir semua daerah dari tahun 2009 sampai 2011 adalah jumlah guru artinya jumlah guru tidak perlu ditambah lagi..

Sebagaimana diketahui bersama bahwa di banyak daerah di Indonesia anggaran belanja pendidikan masih banyak digunakan untuk membayar gaji guru. Mae Chu Chang Spesialis pendidikan Bank Dunia seperti yang dikutip Tribunenews.com mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji guru meningkat tajam seiring dengan meningkatnya jumlah guru secara keseluruhan, dan jumlah ini terus meningkat meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan rasio siswa-guru paling rendah di dunia. Lebih lanjut Mae juga mengatakan bahwa pola pembiayaan yang berlaku saat ini tampaknya belum membawa dampak signifikan pada perbaikan kualitas pendidikan serta akses, pasca wajib belajar 9 tahun bagi siswa miskin.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sepuluh Kab.Kota yang diamati selama 2009-2011 menghasilkan nilai efisiensi yang bervariasi pada masing-masing Kab./Kota dan secara umum masih banyak daerah yang belanjanya belum efisien.
2. Belanja pendidikan masih lebih baik jika dibandingkan dengan belanja kesehatan. Secara umum nilai efisiensi belanja pendidikan di hampir semua Kabupaten/Kota yang diteliti selama tiga tahun pengamatan nilai efisiensi belanja pendidikan masih lebih baik jika dibandingkan belanja kesehatan.
3. Nilai efisiensi pada masing-masing Kab./Kota berfluktuasi ada yang meningkat dan ada yang menurun. Kabupaten Malang merupakan daerah yang paling efisien diantara daerah lainnya dan Kota Surabaya merupakan daerah yang paling tidak efisien.
4. Tingkat *potential improvement* pada tiap daerah dan tiap tahunnya mengalami perbedaan pada variabel yang perlu diperbaiki. Ada beberapa daerah yang hanya perlu memperbaiki inputnya, ada daerah yang perlu memperbaiki salah nput mausatu atau semua outputnya dan ada juga daerah yang memerlukan perbaikan pada variabel ipun output tergantung kondisi daerah masing-masing.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai tingkat efisiensi belanja pendidikan dan kesehatan di 10 Kabupaten/kota di JawaTimur, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah mencapai efisiensi seperti Kabupaten Malang sebaiknya tetap mengawasi dan mengevaluasi belanjanya sehingga pemborosan pengeluaran dapat diminimalkan. Daerah yang efisien adalah daerah yang telah menghasilkan output yang sebanding dengan input yang digunakan, jadi apabila selama ini sudah menghasilkan output yang sesuai sebaiknya lebih meningkatkan kualitas dari output tersebut misalnya dengan memperbaiki fasilitas sekolah dan puskesmas.

2. Bagi Kabupaten/Kota yang belum efisien sebaiknya :
  - a. Pemerintah daerah seharusnya tidak menggunakan sebagian besar belanjanya untuk pegawai, artinya pemerintah daerah tidak perlu menambah jumlah pegawai (guru) lagi.
  - b. Pemerintah daerah seharusnya memperbanyak porsi belanja langsung daripada belanja tidak langsung.
  - c. mengalokasikan belanjanya sesuai untuk pos yang telah direncanakan.
  - d. Membuat program yang langsung menjangkau kepentingan masyarakat agar dana tidak melenceng kepada yang tidak berkepentingan
  - e. Pemerintah daerah harus meminimalisasi dana belanja daerahnya. Meminimalisasi bukan berarti mengurangi pembangunan dan pelayanan public, namun digunakan seefektif mungkin dan memprioritaskan program yang mendesak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. *Anggaran Pendidikan Surabaya Kacau*. <http://www.surabayapagi.com>. Diakses tanggal 15 Juni 2013.
- BPS. 2011. *Statistical Year Book of Indonesia 2011*. BPS
- Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan. 2011. Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Ddalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. *APBD Klasifikasi fungsi*. <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Diakses tanggal 5 Desember 2012.
- Goping, Simatupang. 2013. *Anggaran Pendidikan Habis Untuk Menggaji Guru*. <http://www.tribunnews.com>. Diakses Tanggal 1 Juli 2013.
- Kurnia, Akhmad Syakir. 2006. Model Pengukuran Kinerja Dan Efisiensi sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 2, Agustus 2006 hal: 1-20*
- Mangkoesobroto, Guritno. 1999. *Ekonomi Publik*. BPFE: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Makalah disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia, Jakarta, 7 Mei 2002.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta
- Pamula, Yanita Ega. 2012. *Efisiensi sektor Publik Pendekatan Data Envelopment Analysis Indonesia 2001-2008*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Pertiwi, Lela Dina. 2007. Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No.2*.
- Rachmawati, Aulia. 2011. *Analisis Efisiensi Belanja Daerah Sektor Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus: 8 Kabupaten Wilayah Pantai Selatan Tahun 2007-2009)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Saputra, Putu Mahardika. 2011. Analysis of Technical efficiency of Indonesian Manufacturing Industries: An Application of DEA. *International Research Journal of Finance and Economics*.
- Sofii, Mohammad. 2013. *Jaminan Kesehatan Masyarakat: Banyak Warga Malang Yang Tiba-Tiba Mengaku Miskin..* Diakses Tanggal 15 Juni 2012. <http://www.bisnis-jatim.com>. Diakses Tanggal 15 Juni 2013.
- Suparmoko. 1979. *Asas-Asas Ilmu Keuangan Negara*. BPFE Universitas Gajah Mada: Yogyakarta
- Wulansari, Retno. 2010. *Efisiensi relatif Operasional Puskesmas-Puskesmas Di Kota Semarang Tahun 2009*. Tesis. FEUI. [lontar.ui.ac.id](http://lontar.ui.ac.id). diakses tanggal 4 Februari 2013.
- , Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.